

PERAN DIGITAL MINDSET, PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI DIGITAL TERHADAP PEMBENTUKAN SMART ASN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

Ni Made Ayu Indah Saraswati¹, Ni Putu Tirka Widanti², Nyoman Diah Utari Dewi³

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai

Email Korespondensi: ayu.indah6@gmail.com

Email: tirka.widanti@unr.ac.id; diah.utari@unr.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Digital Mindset, Digital Competence, and Understanding of Good Governance on the development of Smart Civil Servants (ASN) at the Department of Communication and Information Technology (Diskominfo) in Badung Regency. In the context of digital transformation, the presence of adaptive, innovative, and integrity-driven civil servants is essential. A quantitative approach was employed, using survey techniques through questionnaires distributed to 125 employees. The collected data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results reveal that all three independent variables significantly influence the formation of Smart ASN. Digital Mindset has a positive and significant impact, with a path coefficient of 0.291 ($t=3.304$; $p=0.001$). Digital Competence shows the strongest effect with a coefficient of 0.489 ($t=5.607$; $p=0.000$), while Understanding of Good Governance also contributes significantly with a coefficient of 0.205 ($t=3.378$; $p=0.001$). Together, these variables explain 79.7% of the variance in the formation of Smart ASN. These findings emphasize that the development of Smart ASN relies heavily on digital readiness and the internalization of good governance principles. Therefore, the study recommends continuous training in digital mindset, enhancement of digital competence, and consistent implementation of good governance as key strategies for successful and sustainable digital bureaucratic transformation at the Diskominfo of Badung Regency.

Keywords: Smart ASN, Digital Mindset, Digital Competence, Good Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digital Mindset, Kompetensi Digital, dan Pemahaman Good Governance terhadap pembentukan karakter Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Dalam konteks transformasi digital keberadaan ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 125 pegawai. Data dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara signifikan memengaruhi pembentukan Smart ASN. Digital Mindset menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,291 ($t=3,304$; $p=0,001$). Kompetensi Digital memiliki pengaruh paling kuat dengan koefisien sebesar 0,489 ($t=5,607$; $p=0,000$). Pemahaman Good Governance juga berpengaruh secara signifikan dengan koefisien 0,205 ($t=3,378$; $p=0,001$). Ketiganya menjelaskan sebesar 79,7% variasi dalam pembentukan Smart ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan Smart ASN sangat bergantung pada kesiapan digital dan pemahaman tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pelatihan berkelanjutan dalam pola pikir digital, peningkatan kompetensi digital, dan internalisasi prinsip good governance untuk mendorong keberhasilan transformasi birokrasi digital yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Badung.

Kata kunci: Smart ASN, Digital Mindset, Kompetensi Digital, Good Governance.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

440

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi secara optimal penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada warga (Öngel et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan keterampilan abad ke-21 (Partono et al., 2021), di mana perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif menjadi sangat esensial. Digital mindset memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melihat peluang perbaikan, mencoba pendekatan baru, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, ASN dapat menjadi agen utama transformasi digital dalam organisasi pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks teknologi digital, prinsip good governance menjamin bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi berarti informasi mengenai pemanfaatan teknologi, termasuk algoritma dan data yang dikumpulkan, harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan teknologi digital serta sanksi jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika. Partisipasi mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait teknologi digital, sehingga kepentingan dan nilai-nilai mereka diperhitungkan (Mutambik et al., 2023).

Good governance juga mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Pemerintah wajib menjaga data warga negara dari akses tidak sah dan penyalahgunaan (Tridalestari & Prasetyo, 2024), yang menuntut penerapan kebijakan keamanan yang ketat serta pelatihan ASN mengenai pentingnya keamanan data (Wuersch et al., 2024). Dengan demikian, good governance tidak hanya memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga melindungi hak warga dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Mutambik et al., 2023). Kompetensi digital meliputi kemampuan penting seperti penggunaan perangkat lunak, analisis data, dan perlindungan keamanan informasi, yang menjadi dasar bagi ASN di era digital (Cao et al., 2023; Wuersch et al., 2024). Keterampilan menggunakan perangkat lunak memungkinkan ASN bekerja secara efektif dengan berbagai aplikasi dan sistem dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Kemampuan analisis data membantu ASN mengolah dan memahami informasi kompleks untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Sudibjo et al., 2022). Selain itu, kompetensi keamanan informasi penting untuk melindungi data sensitif dan sistem pemerintah dari ancaman siber (Kifaru et al., 2023; Vartolomei & Avasilcăi, 2020), termasuk pemahaman praktik keamanan terbaik, kemampuan merespons insiden keamanan, dan kesadaran terhadap risiko teknologi digital. Dengan kompetensi digital yang memadai, ASN dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan pelayanan publik (Wuersch et al., 2024). Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan program pelatihan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi digital ASN.

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari format analog ke digital, seperti memindai dokumen kertas menjadi file digital. Transformasi digital, sebaliknya, lebih dari sekadar digitalisasi (Chapco-Wade-Safina, 2018). Transformasi digital melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis baru, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengembangkan budaya organisasi yang lebih inovatif (Lachova, 2021). Singkatnya, digitalisasi adalah langkah awal dalam perjalanan transformasi digital (Rupeika-Apoga et al., 2022), sedangkan transformasi digital merupakan perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai (Vaska et al., 2021). Transformasi digital mencakup perubahan proses bisnis, model organisasi, dan budaya kerja yang dipacu oleh teknologi digital. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki peran kunci dalam mengawal transformasi digital di daerah, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi prioritas utama. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi demi meningkatkan efisiensi administrasi, keterbukaan, serta mempermudah akses layanan publik (Gusman, 2024). ASN sebagai pelaksana pemerintahan harus mampu cepat beradaptasi dengan perubahan ini.

Perpaduan antara digital mindset, pemahaman good governance, dan kompetensi digital akan

menghasilkan Smart ASN yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Abdillah et al., 2021; Dewi, 2020). ASN dengan digital mindset selalu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, serta berani mengambil risiko mencoba hal baru. Dengan pemahaman mendalam tentang good governance, ASN dapat memastikan teknologi digital digunakan secara bertanggung jawab sesuai prinsip etika dan hukum. Kabupaten Badung, yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang signifikan, menghadapi tantangan dan peluang unik di era digital (Damayanti et al., 2021). Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memegang peran sentral dalam memimpin transformasi digital daerah, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi prioritas utama.

Tabel 1: 6 Besar Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Badung Per 31 Desember 2024

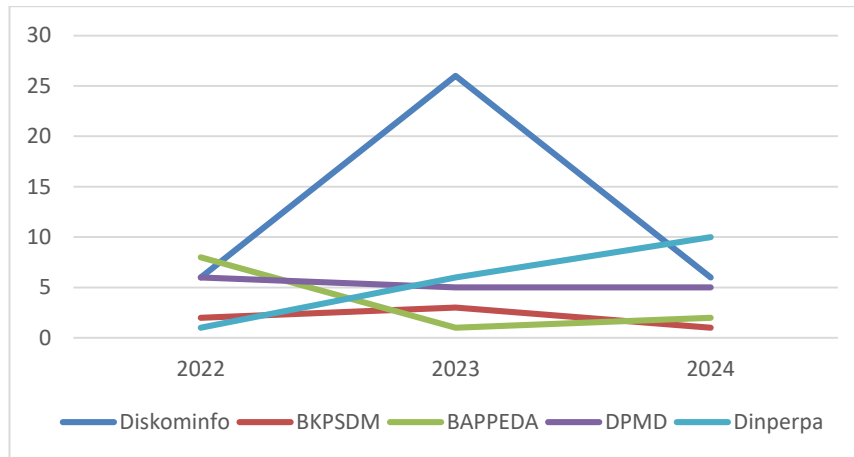
No	Instansi	Jumlah Pegawai Aktif	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62	24,11	35,77	26,53	5,00	91,41
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57	24,12	34,49	25,70	5,00	89,31
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	23,92	34,99	25,14	5,00	89,04
4	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	27	24,26	33,78	25,00	5,00	88,04
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36	23,61	33,65	25,00	5,00	87,26
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	39	23,59	33,59	25,00	4,90	87,08

Sumber: Kabupaten Badung

Tabel di atas memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Tabel tersebut menyajikan perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) di berbagai instansi, yang mencerminkan tingkat profesionalitas ASN pada masing-masing lembaga. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menempati posisi teratas dengan skor 91,41, memperlihatkan tingkat profesionalitas ASN tertinggi. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada peringkat ke-6 dengan skor 87,08. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Dinas Kominfo cukup baik, meskipun masih terdapat peluang untuk peningkatan lebih lanjut.

Data IPASN ini menjadi dasar penting untuk justifikasi penelitian tentang pengaruh digital mindset, pemahaman good governance, dan kompetensi digital terhadap pembentukan Smart ASN. Hal ini karena Dinas Kominfo memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program-program Smart City serta transformasi digital di tingkat daerah. Gambar 1 dibawah ini menampilkan grafik peringkat IPASN Kabupaten Badung. Terjadi fluktuasi signifikan peringkat Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 2022, Diskominfo berada di peringkat ke-6, kemudian mengalami penurunan drastis ke peringkat 26 pada 2023, dan kembali naik ke peringkat ke-6 pada 2024. Perubahan peringkat yang tajam ini mencerminkan dinamika kompleks dalam kinerja serta profesionalitas ASN di lingkungan Diskominfo, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

Gambar 1. Grafik Peringkat IPASN Kabupaten Badung



Sumber: Kabupaten Badung

Untuk mengejar ketertinggalan ini, perlu dipersiapkan generasi Smart ASN yang inovatif, adaptif, dan progresif. ASN harus memiliki pola pikir digital yang mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemecahan masalah. Selain itu, ASN harus memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, agar pemanfaatan teknologi digital dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan kompetensi digital yang memadai, termasuk keterampilan menggunakan perangkat lunak, menganalisis data, dan menjaga keamanan informasi, generasi Smart ASN ini akan mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi digital menjadi sangat krusial mengingat kebutuhan Indonesia akan talenta digital yang terus meningkat (Zahra, 2023).

Peningkatan kapasitas tersebut mencakup pengembangan digital mindset (Wuersch et al., 2024), pemahaman good governance, dan peningkatan kompetensi digital (Kurniawan & Mumpuni Arti, 2020). Digital mindset mendukung kemampuan ASN untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah melalui teknologi digital (Wuersch et al., 2024). Pemahaman good governance menjamin pemanfaatan teknologi digital yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Tridalestari & Prasetyo, 2024). Kompetensi digital, yang meliputi kemampuan menggunakan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan informasi, merupakan keterampilan esensial ASN di era digital (Sudibjo et al., 2022).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan pentingnya pengembangan e-government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien (Mindarti et al., 2020). Digitalisasi pelayanan publik menjadi keharusan demi peningkatan transparansi dan mutu layanan kepada masyarakat (Rauan et al., 2022). Pengembangan kompetensi digital merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Smart ASN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital dilakukan melalui regulasi adaptif serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten (Kurniawan & Mumpuni Arti, 2020). ASN yang kompeten akan mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah dan data tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Peran Digital Mindset, Pemahaman Good Governance, dan Kompetensi Digital terhadap Pembentukan Smart Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung”. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan

pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Responden penelitian terdiri dari 125 pegawai yang dipilih secara purposive sampling untuk memastikan representativitas data sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuesioner yang mengukur variabel digital mindset, kompetensi digital, pemahaman good governance, dan pembentukan Smart ASN menggunakan indikator-indikator yang valid dan reliabel. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4. Proses analisis dimulai dengan pengecekan outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas indikator, kemudian dilanjutkan dengan analisis inner model menggunakan teknik bootstrapping sebanyak 500 sampel ulang untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel berdasarkan nilai t-statistik dan p-value. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data yang tidak berdistribusi normal dan mampu menguji pengaruh simultan antar variabel laten yang kompleks, sehingga menghasilkan model yang valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan variabel Smart ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Badung

PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Responden

Tabel 2: Hasil Uji Deskriptif

Deskripsi Responden	Keterangan	Jumlah	Persentasi
Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki – laki	87	69,6%
	Perempuan	38	30,4%
Total		125	100
Berdasarkan Usia	20-25 Tahun	2	1,6%
	26-30 Tahun	12	9,6%
	31-35 Tahun	52	41,6%
	36-40 Tahun	25	20,0%
	41-45 Tahun	20	16,0%
	46-50 Tahun	9	7,2%
	>50 tahun	5	4,0%
Total		125	100%
Berdasarkan Latarbelakng Pendidikan	SMA / SMK / Sederajat	19	15,2%
	Diploma	3	2,4%
	Sarjana	92	73,6%
	Pasca Sarjana	11	8,8%
Total		125	100%
Berdasarkan Lama Bekerja	< 1 Tahun	2	1,6%
	1-3 Tahun	3	2,4%
	4-6 Tahun	32	25,6%
	6-10 Tahun	44	35,2%
	>10 tahun	44	35,2%
Total		125	100%

Sumber: Data penelitian 2025

Penelitian ini melibatkan 125 orang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai responden. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 87 orang (69,6%), sementara perempuan berjumlah 38 orang (30,4%). Dominasi laki-laki ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi dan informatika, masih lebih banyak didominasi

oleh tenaga kerja pria, yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan teknis dan operasional di lapangan yang masih dianggap lebih banyak melibatkan peran laki-laki. Dari sisi usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif. Kelompok usia 31–35 tahun mendominasi dengan jumlah 52 orang (41,6%), diikuti oleh usia 36–40 tahun sebanyak 25 orang (20%) dan 26–30 tahun sebanyak 12 orang (9,6%). Sementara itu, usia >50 tahun hanya berjumlah 5 orang (4%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Badung berada pada usia kerja aktif dan matang secara pengalaman kerja, yang sangat relevan dalam mendukung implementasi kebijakan digital.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan Sarjana (S1) sebanyak 92 orang (73,6%). Sementara itu, responden dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK berjumlah 19 orang (15,2%), Pascasarjana (S2) sebanyak 11 orang (8,8%), dan Diploma hanya 3 orang (2,4%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki bekal pendidikan tinggi yang mendukung dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berbasis teknologi dan informasi. Dari sisi lama bekerja, responden dengan masa kerja 6–10 tahun dan lebih dari 10 tahun masing-masing berjumlah 44 orang (35,2%). Responden dengan masa kerja 4–6 tahun sebanyak 32 orang (25,6%), sedangkan yang bekerja kurang dari 3 tahun hanya berjumlah 5 orang (4%). Ini menandakan bahwa mayoritas pegawai sudah cukup lama mengabdikan, sehingga memiliki pemahaman yang baik terhadap dinamika kerja di instansi tersebut, serta kesiapan dalam mengadopsi transformasi digital birokrasi.

Hasil Uji Outer Model

Analisis outer model merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam membangun model jalur menggunakan perangkat lunak SmartPLS (Partial Least Squares Structural Equation Modeling). Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan benar-benar mampu menggambarkan variabel laten atau konstruk secara akurat dan konsisten. Analisis outer model berfokus pada bagaimana suatu konstruk diukur melalui indikator-indikator yang dapat diamati secara langsung. Untuk menilai sejauh mana pengukuran tersebut sudah tepat, digunakan beberapa uji, antara lain Validitas Konvergen untuk melihat apakah indikator-indikator dalam satu konstruk saling mendukung atau berkorelasi positif, Validitas Diskriminan untuk memastikan bahwa konstruk yang berbeda tidak saling tumpang tindih, Komposit reabilitas untuk mengukur konsistensi internal antar indikator dalam satu konstruk, serta Cronbach's alpha untuk menguji keandalan atau reliabilitas keseluruhan. Melalui serangkaian uji ini, peneliti dapat memastikan bahwa model yang dibangun telah memenuhi syarat valid dan reliabel, sehingga hasil analisis selanjutnya dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

Uji Validitas Kovergen

Validitas konvergen merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pemodelan jalur menggunakan pendekatan Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling (SEM). Validitas ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator yang digunakan benar-benar mampu mencerminkan konstruk atau variabel laten yang dimaksud dalam model penelitian. Dengan kata lain, validitas konvergen menunjukkan seberapa baik indikator-indikator tersebut berkumpul dan saling menguatkan dalam menggambarkan satu konstruk yang sama. Dalam konteks analisis PLS-SEM, validitas konvergen dinilai melalui nilai factor loading atau outer loading dari masing-masing indikator terhadap konstraknya. Secara umum, nilai loading yang dianggap baik dan kuat berada di atas angka 0,7 (Hair et al., 2019)(Haryono, 2017). Namun demikian, pada penelitian yang sifatnya pengembangan skala atau eksploratif, nilai loading sebesar 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2018). Outer loading sendiri merupakan ukuran statistik yang menggambarkan seberapa besar kontribusi indikator dalam menjelaskan variabel laten. Dalam model reflektif, penting untuk memastikan bahwa indikator memiliki nilai loading yang tinggi agar dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut secara konsisten dan signifikan

merepresentasikan konstruk yang sedang diteliti. Validitas konvergen yang baik menjadi dasar bagi kekuatan pengukuran model secara keseluruhan.

Tabel 3: Loading Factor Analisis

Item	Outer Loading / Loading Factor			
	Digital Mindset	Kompetensi Digital	Pemahaman Good Governance	Smart ASN
DM2	0,829			
DM3	0,687			
DM4	0,759			
DM5	0,802			
DM6	0,826			
DM7	0,855			
DM8	0,811			
DM9	0,803			
KD1		0,714		
KD2		0,847		
KD3		0,662		
KD4		0,910		
KD5		0,868		
GG1			0,833	
GG2			0,881	
GG3			0,924	
GG4			0,925	
SASN1				0,800
SASN2				0,774
SASN3				0,802
SASN4				0,823
SASN5				0,767
SASN6				0,845
SASN7				0,837
SASN8				0,867

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Dari total 26 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat satu indikator yang dinyatakan tidak lolos uji, yaitu indikator DM1 karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sementara itu, 25 indikator lainnya menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai *outer loading* di atas 0,7, yang berarti telah memenuhi persyaratan validitas konvergen. Selain itu, seluruh variabel dalam model juga memiliki nilai *average variance extracted (AVE)* di atas 0,5, yang menandakan bahwa proporsi varians yang dijelaskan oleh konstruk lebih besar dibandingkan dengan varians kesalahan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan dengan demikian dapat dianggap valid (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

Tabel 4: Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
<i>Digital Mindset</i>	0,637
Kompetensi Digital	0,649
Pemahaman <i>Good Governance</i>	0,795
<i>Smart ASN</i>	0,664

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dalam analisis PLS-SEM. Konsep ini menekankan pentingnya membedakan satu konstruk dari konstruk lainnya dalam model, agar setiap variabel yang diteliti benar-benar memiliki ciri khas dan tidak tumpang tindih. Dengan kata lain, validitas diskriminan memastikan bahwa setiap konstruk yang digunakan bersifat unik dan mampu berdiri sendiri secara konsep maupun statistik. Menurut (Shmueli et al., 2019), salah satu cara untuk mengevaluasi validitas diskriminan adalah dengan menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*. Jika sebuah model memiliki validitas diskriminan yang baik, maka hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat dipercaya karena masing-masing konstruk diukur dengan indikator yang memang merepresentasikan hal yang berbeda. Berdasarkan Tabel 5.7, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE (\sqrt{AVE}) dari setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasinya terhadap konstruk lain, yang berarti model ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan dengan baik. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah terukur dengan tepat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5: Fornell-Lacker Criterion analysis

Variabel	<i>Digital Mindset</i>	Kompetensi Digital	Pemahaman <i>Good Governance</i>	<i>Smart ASN</i>
<i>Digital Mindset</i>	0,808			
Kompetensi Digital	0,801	0,856		
Pemahaman <i>Good Governance</i>	0,612	0,651	0,892	
<i>Smart ASN</i>	0,789	0,806	0,702	0,815

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Selain menggunakan nilai akar AVE (\sqrt{AVE}) sebagai acuan, validitas diskriminan juga dapat dievaluasi melalui analisis *cross loading*. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi indikator terhadap konstruk yang diukur dengan korelasinya terhadap konstruk lain. Sebuah indikator dikatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai *cross loading*-nya terhadap konstruk asal lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya, dan umumnya dianggap valid jika nilainya berada di atas 0,6 (Haryono, 2017; Hair et al., 2019). Dengan kata lain, indikator yang digunakan harus lebih kuat berkorelasi dengan konstruk yang seharusnya diwakili, daripada dengan konstruk lain dalam model. Jika hal ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa setiap konstruk memiliki kejelasan makna dan tidak saling tumpang tindih, sehingga model dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

Tabel 6: *Cross Loading*

Item	Digital Mindset	Kompetensi Digital	Pemahaman Good Governance	Smart ASN
DM2	0,829	0,681	0,469	0,641
DM3	0,687	0,638	0,371	0,543
DM4	0,759	0,592	0,435	0,632
DM5	0,802	0,643	0,522	0,665
DM6	0,826	0,558	0,514	0,644
DM7	0,855	0,695	0,511	0,679
DM8	0,811	0,606	0,464	0,630
DM9	0,803	0,701	0,591	0,709
KD1	0,526	0,714	0,653	0,576
KD2	0,628	0,847	0,572	0,701
KD3	0,580	0,662	0,275	0,560
KD4	0,749	0,910	0,527	0,761
KD5	0,720	0,868	0,583	0,809
GG1	0,512	0,568	0,833	0,587
GG2	0,525	0,519	0,881	0,615
GG3	0,598	0,635	0,924	0,674
GG4	0,542	0,596	0,925	0,623
SASN1	0,637	0,642	0,729	0,800
SASN2	0,558	0,612	0,701	0,774
SASN3	0,663	0,776	0,504	0,802
SASN4	0,690	0,696	0,490	0,823
SASN5	0,707	0,710	0,364	0,767
SASN6	0,633	0,681	0,588	0,845
SASN7	0,738	0,727	0,478	0,837
SASN8	0,639	0,726	0,718	0,867

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Uji Reliabilitas Komposit

Analisis reliabilitas dalam *Smart PLS* merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian benar-benar konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur konsep yang sedang diteliti. Melalui dua alat ukur utama, yaitu koefisien *Cronbach's Alpha* untuk menilai reliabilitas internal dan Reabilitas Komposit untuk menilai konsistensi antar item dalam satu konstruk, peneliti bisa mengetahui apakah indikator-indikator yang digunakan sudah bekerja secara konsisten dalam menjelaskan variabel laten. Selain itu, dari analisis ini juga dapat diketahui apakah ada item yang perlu diperbaiki atau bahkan dihapus demi meningkatkan kualitas pengukuran. Berdasarkan panduan dari (Sugiyono, 2019) dan (Ghozali, 2018), suatu konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai reliabilitasnya lebih dari 0,7. Hasil yang ditampilkan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Reabilitas Komposit di atas angka tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik, dan dapat dipercaya untuk mendukung proses analisis dan pengambilan kesimpulan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

448

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Tabel 7: Reliability Analysis

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Digital Mindset	0,933	0,918
Kompetensi Digital	0,901	0,861
Pemahaman Good Governance	0,939	0,913
Smart ASN	0,940	0,927

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel berikut, dapat terlihat bahwa masing-masing konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Composite Reliability (CR)* yang sangat memuaskan. Nilai CR untuk konstruk *Digital Mindset* tercatat sebesar **0,901**, Kompetensi Digital sebesar **0,933**, Persepsi *Good Governance* sebesar **0,939**, dan *Smart-ASN* sebesar **0,940**. Nilai-nilai ini semuanya berada di atas ambang batas minimal 0,7 yang disarankan dalam pengujian reliabilitas konstruk, yang menunjukkan bahwa keempat konstruk tersebut memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Dengan kata lain, indikator-indikator yang digunakan dalam masing-masing konstruk mampu bekerja secara stabil dan konsisten dalam mengukur konsep yang dimaksud. Hasil ini juga menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas pengukuran yang tinggi, karena setiap konstruk mampu merepresentasikan variabel laten dengan andal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keempat konstruk reflektif tersebut *Digital Mindset*, Kompetensi Digital, Persepsi *Good Governance*, dan *Smart-ASN* telah memenuhi kriteria reliabilitas komposit dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Keandalan ini sangat penting untuk menjamin ketepatan interpretasi hasil dan mendukung validitas keseluruhan model Penelitian

Uji Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai reliabilitas suatu instrumen, khususnya dalam menguji sejauh mana item-item dalam satu konstruk saling konsisten dan berkorelasi secara internal. Ukuran ini digunakan untuk memastikan bahwa serangkaian pertanyaan atau pernyataan dalam sebuah skala benar-benar mengukur hal yang sama, atau dengan kata lain, apakah seluruh item dalam konstruk tersebut memiliki arah dan makna yang sejalan. Nilai Cronbach's Alpha berada dalam rentang 0 hingga 1, dan semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi tingkat reliabilitasnya. Secara umum, nilai di atas 0,7 dianggap sudah cukup baik untuk menunjukkan bahwa suatu konstruk bersifat reliabel, terutama dalam konteks pengukuran psikometrik (Hair et al., 2019).

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Tabel 7, seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas ambang batas tersebut, yang berarti bahwa instrumen yang digunakan telah terbukti memiliki konsistensi internal yang kuat. Konstruk dengan nilai terendah adalah Kompetensi Digital dengan nilai 0,861, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada konstruk *Smart-ASN* dengan nilai 0,927. Kedua nilai ini sudah sangat baik dan menunjukkan bahwa item-item yang digunakan dalam setiap konstruk mampu bekerja secara seragam dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi standar reliabilitas, memberikan dasar yang kokoh untuk melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

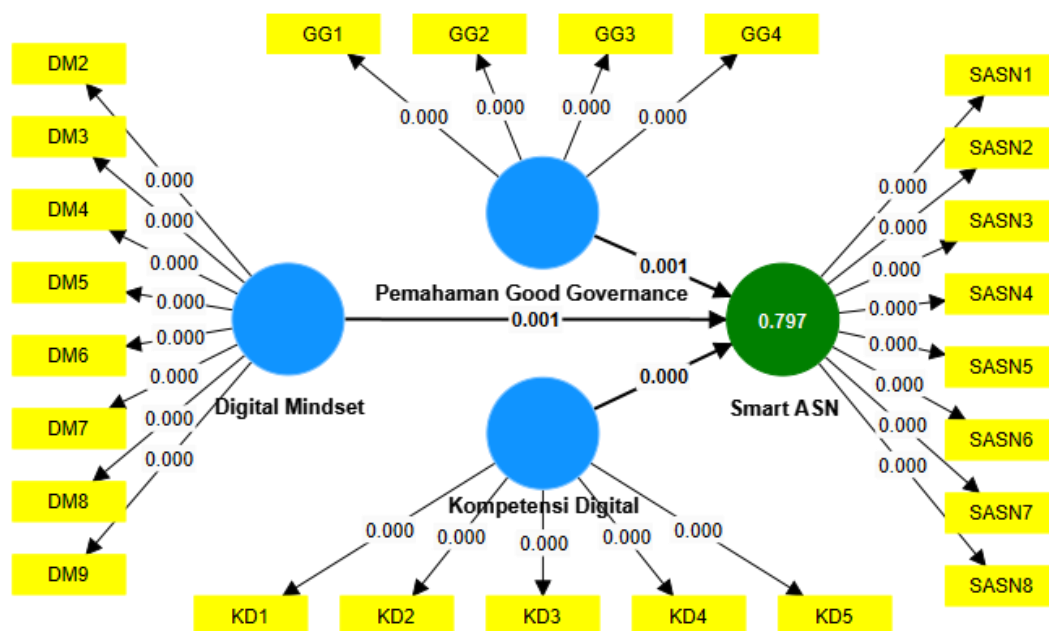
Hasil Uji Inner Model

Sebelum masuk ke tahap pengujian hipotesis, langkah awal yang dilakukan adalah proses *bootstrapping*. Teknik ini sangat penting dalam analisis menggunakan *Partial Least Squares (PLS)* karena memungkinkan peneliti untuk menguji seberapa kuat dan stabil hubungan antar variabel dalam model. Sederhananya, *bootstrapping* bekerja dengan mengambil sampel ulang dari data yang tersedia semacam

simulasi berulang untuk menghitung kembali nilai parameter, seperti koefisien jalur antar variabel. Dari proses ini, diperoleh nilai *p-value* yang menjadi dasar apakah suatu hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak secara statistik.

Jika nilai *p-value* lebih kecil dari ambang batas signifikansi (biasanya 0,05), maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel tersebut cukup kuat untuk diterima secara ilmiah. Dalam konteks ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai *t-statistic* dan *p-value* di mana jika nilai *t* lebih dari 1,96 dan *p-value* di bawah 0,05, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Artinya, ada pengaruh yang nyata secara statistik antara variabel-variabel yang diuji (Usman & Akbar, 2020).

Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 125 orang, yang dianggap sudah cukup memadai untuk metode PLS. Salah satu keunggulan dari pendekatan PLS adalah sifatnya yang tidak terlalu menuntut distribusi data yang normal, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi data. Untuk proses *bootstrapping*-nya sendiri, peneliti menetapkan jumlah sampel ulang sebanyak 500 kali, sesuai dengan rekomendasi (Sarstedt et al., 2023), agar hasil pengujian lebih stabil dan meyakinkan. Hasil dari proses ini kemudian divisualisasikan dalam Model Struktur Bootstrapping pada Gambar 2.



Gambar 2. Structural Model (Bootstrapping)

Sumber: Output Smart PLS 4

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam aplikasi SmartPLS pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) pada umumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dalam model yang dibangun benar-benar signifikan secara statistik. Proses ini penting untuk memastikan apakah model yang digunakan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, serta apakah hubungan antar variabel yang diasumsikan benar-benar terjadi atau tidak. Dalam praktiknya, untuk menilai signifikansi hubungan tersebut, digunakan uji *t-statistic* dan *p-value*. Keduanya merupakan alat bantu utama yang digunakan SmartPLS untuk mengevaluasi kekuatan dan keabsahan hubungan antar konstruk dalam model. Setiap jalur hubungan (path coefficient) dalam model akan dianalisis, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk nilai *t-statistic* dan *p-value*. Jika *p-value* lebih kecil dari nilai ambang yang umum digunakan, yaitu 0,05, maka hubungan

tersebut dianggap signifikan. Artinya, kita dapat menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara variabel-variabel tersebut. Metode ini menjadi salah satu cara paling populer dan sering digunakan dalam analisis PLS, karena tidak hanya memberikan hasil yang kuat dalam situasi data yang kompleks atau terbatas, tetapi juga dapat memberikan kejelasan tentang kontribusi masing-masing variabel terhadap model secara keseluruhan. Dengan melihat nilai t-statistik yang melebihi angka 1,96 dan p-value di bawah 0,05, peneliti dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa jalur tersebut memang memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian hipotesis ini ditampilkan secara rinci pada Tabel 8 di bawah, yang menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 8: Menguji Hipotesis penelitian (*path coefficients*)

Hipotesis	Original sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Digital Mindset -> Smart ASN	0,291	0,293	0,088	3,304	0,001
Pemahaman Good Governance -> Smart ASN	0,205	0,198	0,061	3,378	0,001
Kompetensi Digital -> Smart ASN	0,489	0,492	0,087	5,607	0,000

Sumber: *Output Smart PLS 4*

Berdasarkan Tabel 8, analisis hipotesis dalam pendekatan PLS dilakukan dengan melihat nilai p-value dan t-statistik untuk menilai apakah hubungan antar variabel dalam model signifikan secara statistik. Dalam hal ini, suatu jalur dianggap signifikan jika t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh antar konstruk dalam model bukan terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki kekuatan statistik yang meyakinkan. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) dapat ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Ini memperkuat bahwa model yang digunakan memiliki hubungan yang valid antar variabel yang diteliti.

Pertama, hipotesis H1 menyatakan bahwa Digital Mindset berpengaruh terhadap Smart ASN. Hasil pengujian menunjukkan nilai original sample sebesar 0,291, nilai t-statistik sebesar 3,304, dan p-value sebesar 0,001. Karena nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Digital Mindset terhadap Smart ASN signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi pola pikir digital yang dimiliki ASN, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menjadi ASN yang adaptif terhadap teknologi digital. Dengan demikian, hipotesis H1 dinyatakan diterima, yang berarti terdapat hubungan yang nyata dan positif antara Digital Mindset dan pembentukan Smart ASN.

Kedua, hipotesis H2 menyatakan bahwa Pemahaman terhadap Good Governance berpengaruh terhadap Smart ASN. Hasil menunjukkan nilai original sample 0,205, t-statistik 3,378, dan p-value 0,001. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar dua variabel sebelumnya, namun nilai statistik tersebut tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini menandakan bahwa ASN yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih mampu bertindak secara profesional dan akuntabel dalam lingkungan kerja digital. Dengan demikian, hipotesis H2 juga diterima, yang berarti pemahaman yang baik terhadap prinsip Good Governance berkontribusi secara positif dalam mendukung karakteristik ASN yang responsif dan berintegritas di era digital.

Ketiga, hipotesis H3 menguji pengaruh Kompetensi Digital terhadap Smart ASN. Nilai original sample sebesar 0,489, t-statistik 5,607, dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan ASN dalam menggunakan dan memahami teknologi digital memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter ASN yang modern dan cakap secara digital. Kompetensi digital terbukti menjadi elemen kunci dalam proses digitalisasi birokrasi. Dengan demikian, hipotesis H3 juga diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi digital seorang ASN, maka semakin tinggi pula kualitasnya sebagai ASN yang cerdas secara digital.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, diketahui bahwa variabel *Digital Mindset*, Kompetensi Digital, dan Pemahaman terhadap *Good Governance* memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap pembentukan perilaku *Smart ASN*. Hal ini tercermin dari nilai *R-Square (R²)* sebesar 0,797, yang mengindikasikan bahwa 79,7% variasi pada variabel *Smart ASN* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Nilai ini tergolong sangat kuat, mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2019), bahwa nilai $R^2 \geq 0,75$ termasuk kategori tinggi. Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik.

Tabel 9: R-Square

Variabel	R-Square
<i>Smart ASN</i>	0,797

Sumber: Output Smart PLS 4

Lebih lanjut, untuk melihat kontribusi masing-masing variabel secara individu dalam memengaruhi *Smart ASN*, digunakan nilai *f-Square (f²)*. Nilai *f²* menggambarkan besarnya efek (effect size) dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat ketika variabel tersebut dimasukkan atau dikeluarkan dari model. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Digital memberikan pengaruh paling besar dengan nilai *f²* sebesar 0,373 yang berada pada kategori sedang hingga kuat. Sementara itu, *Digital Mindset* memiliki nilai *f²* sebesar 0,144 dan Pemahaman *Good Governance* sebesar 0,115, yang keduanya masuk dalam kategori kecil hingga sedang namun tetap memberikan kontribusi yang berarti (Cohen, 1988; Hair et al., 2019).

Tabel 10: f-Square

Variabel	f-Square
<i>Digital Mindset -> Smart ASN</i>	0,144
Kompetensi Digital -> <i>Smart ASN</i>	0,373
Pemahaman <i>Good Governance -> Smart ASN</i>	0,115

Sumber: Output Smart PLS 4

Dengan demikian, H4 diterima, yang menyatakan bahwa *Digital Mindset*, Kompetensi Digital dan Pemahaman *Good Governance* secara Bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap *Smart ASN* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Ketiga variabel ini tidak hanya relevan, tetapi juga saling melengkapi dalam mendorong pembentukan ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam menghadapi era transformasi digital birokrasi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi digital ASN yang dibarengi dengan internalisasi pola pikir digital serta nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), guna menciptakan ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, namun juga tangguh secara etika dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Peran Digital Mindset terhadap pembentukan Smart ASN pada pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Digital Mindset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Smart ASN, dengan nilai koefisien sebesar 0,291, nilai t-statistik sebesar 3,304, dan p-value sebesar 0,001. Nilai ini telah melampaui ambang batas signifikansi statistik ($t > 1,96$ dan $p < 0,05$), yang berarti hubungan antara pola pikir digital dan karakteristik Smart ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terbukti secara empiris. Pola pikir digital mengacu pada cara berpikir terbuka terhadap inovasi teknologi, kecepatan beradaptasi, serta kesiapan dalam menerima perubahan berbasis digital. Hal ini sangat relevan di sektor pemerintahan, khususnya di instansi yang menangani teknologi informasi dan komunikasi seperti Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

452

Indexed



Dengan hasil analisis tersebut, maka hipotesis H1 dinyatakan diterima, yang berarti pola pikir digital ASN berkontribusi signifikan dalam pembentukan karakter Smart ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Hal ini menegaskan bahwa penguatan Digital Mindset merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi birokrasi digital yang berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan era 4.0 dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan pelatihan dan pembinaan ASN dalam aspek pola pikir digital.

Pegawai atau ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Badung dituntut untuk mampu memahami dan mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam tugas sehari-hari, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan data, maupun komunikasi antar lembaga. Dengan memiliki pola pikir digital yang baik, staf Komunikasi dan Informatika lebih siap dalam menghadapi transformasi digital, lebih terbuka terhadap aplikasi digital baru, serta lebih mampu berinovasi dalam menciptakan solusi berbasis teknologi. Artinya, Digital Mindset menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membentuk ASN yang cakap teknologi dan berorientasi masa depan di lingkungan birokrasi daerah. Sebagai contoh, Widyaningsih et al. menekankan bahwa individu yang memiliki sikap terbuka dan berani menghadapi risiko cenderung lebih mampu mengembangkan kemampuan digital dan kewirausahaan, yang relevan dengan kebutuhan ASN dalam menghadapi era digital (Widyaningsih et al., 2023).

Dari hasil ini, mengisyaratkan bahwa peningkatan pola pikir digital dapat menciptakan ASN yang lebih cakap teknologi dan lebih siap menghadapi kemajuan digital, yang esensial dalam membangun e-government yang efektif. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan dukungan lebih lanjut untuk hasil ini, yang menunjukkan bahwa sikap positif terhadap teknologi dan kapasitas adaptif memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas birokrasi di era digital (Khaeromah et al., 2023; Tasyah et al., 2021).

Peran Pemahaman Good Governance terhadap pembentukan Smart ASN pada pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Hasil analisis hipotesis H2 menunjukkan bahwa Pemahaman Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Smart ASN, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,205, t-statistik sebesar 3,378, dan p-value sebesar 0,001. Nilai t yang lebih besar dari 1,96 dan p-value yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan ini secara statistik signifikan. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman ASN terhadap prinsip-prinsip Good Governance, maka semakin besar kemungkinan mereka menunjukkan karakteristik ASN yang cerdas (Smart ASN). Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, pemahaman terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting karena institusi ini menjadi garda depan dalam pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku ASN yang profesional. ASN di Komunikasi dan Informatika Badung yang memahami prinsip-prinsip ini cenderung bekerja dengan integritas tinggi, menyajikan informasi kepada publik secara terbuka, dan bertanggung jawab atas keputusan maupun layanan yang diberikan. Selain itu, pemahaman Good Governance juga mendorong terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik dan bukan semata-mata pada kepentingan birokrasi internal. Dengan demikian, pemahaman terhadap tata kelola yang baik menjadi modal dasar dalam mewujudkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas.

Berdasarkan hasil tersebut, artinya pemahaman terhadap Good Governance terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas ASN sebagai Smart ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Artinya, jika ingin memperkuat transformasi digital birokrasi, maka pemahaman tata kelola yang baik perlu terus ditanamkan melalui sosialisasi, pelatihan etika birokrasi, serta praktik kerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadi kunci untuk menciptakan

ASN yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki orientasi moral dan nilai-nilai pemerintahan yang benar.

Penelitian oleh Hasan menunjukkan bahwa pemahaman tentang Good Governance menjadi salah satu faktor penting dalam membangun karakter ASN yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan birokrasi kontemporer Hasan (2019). ASN dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini akan lebih mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemahaman terhadap Good Governance juga mendorong budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan hanya kepentingan internal birokrasi Hasan (2019), Khaeromah et al. (2023).

Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap Good Governance terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas ASN sebagai Smart ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Oleh karena itu, untuk memperkuat transformasi digital birokrasi, penting untuk terus menanamkan pemahaman tentang tata kelola yang baik melalui sosialisasi, pelatihan etika birokrasi, serta praktik kerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menciptakan ASN yang tidak hanya cakap dalam penggunaan teknologi, tetapi juga memiliki orientasi moral dan memegang teguh nilai-nilai pemerintahan yang benar Sanjaya & Darma (2023).

Peran Kompetensi Digital terhadap pembentukan Smart ASN pada pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Hasil pengujian hipotesis kedua (H3) menunjukkan bahwa Kompetensi Digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Smart ASN, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,489, t-statistik sebesar 5,607, dan p-value sebesar 0,000. Angka-angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi digital dengan pembentukan ASN yang cerdas secara digital sangat kuat dan dapat dipercaya secara statistik (karena $t > 1,96$ dan $p < 0,05$). Ini menegaskan bahwa semakin tinggi kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN, maka semakin tinggi pula tingkat kecakapan mereka sebagai Smart ASN. Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, kondisi ini sangat relevan, mengingat pegawai di sana bekerja dalam lingkungan kerja yang dituntut serba digital dan adaptif terhadap teknologi informasi.

Kompetensi digital mencakup kemampuan ASN dalam mengoperasikan perangkat lunak dan keras, memahami sistem informasi, menggunakan internet dan aplikasi berbasis web, serta mengamankan data dan informasi secara profesional. Di Komunikasi dan Informatika Badung, kompetensi ini menjadi keharusan karena banyak layanan publik, pengelolaan media informasi, sistem komunikasi internal pemerintah, serta koordinasi antarlembaga sudah memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, ASN yang memiliki kompetensi digital tinggi lebih siap mendukung pelaksanaan program-program digitalisasi yang dicanangkan pemerintah daerah. Kompetensi ini juga membantu menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Dengan hasil tersebut, maka berarti kompetensi digital ASN secara signifikan mendorong terbentuknya karakter Smart ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Artinya, untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan modern, peningkatan kapasitas kompetensi digital pegawai menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Temuan ini memberikan arahan konkret bagi pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan ASN agar kompeten secara digital dalam menghadapi era transformasi pemerintahan digital dan revolusi industri 4.0.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menggarisbawahi pentingnya kompetensi digital di kalangan pegawai pemerintah. Penelitian oleh Cordella et al. menyoroti bahwa kekurangan dalam kompetensi digital dapat menghalangi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam era digital, yang semakin mengutamakan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam pemberian layanan publik (Cordella et al., 2024). Selain itu, pembelajaran dan pengembangan kompetensi digital dianggap penting untuk meningkatkan kinerja ASN dalam konteks digitalisasi pemerintahan (Tuoi & Thanh, 2023). Agar Dinas Komunikasi dan Informatika mampu berfungsi secara optimal, harus ada upaya berkelanjutan untuk

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi dalam kompetensi digital.

Berdasarkan hasil tersebut, kompetensi digital ASN tidak hanya berkontribusi terhadap terbentuknya karakter Smart ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kompetensi digital pegawai menjadi prioritas yang mendesak, untuk memastikan bahwa birokrasi dapat beradaptasi dan bersaing di tengah tuntutan transformasi digital dan revolusi industri 4.0 (Krisnawati & Bagia, 2021).

Peran Digital Mindset, Kompetensi Digital dan Pemahaman Good Governance secara simultan terhadap pembentukan Smart ASN pada pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (H4) yaitu model yang dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan Smart ASN memiliki kekuatan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari nilai R-Square (R^2) sebesar 0,797, yang berarti bahwa sebesar 79,7% variasi pada variabel Smart ASN dapat dijelaskan oleh tiga konstruk utama, yaitu Digital Mindset, Kompetensi Digital, dan Pemahaman terhadap Good Governance. Nilai R^2 ini termasuk dalam kategori kuat menurut klasifikasi Hair et al. (2019), yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter ASN yang adaptif dan siap menghadapi tantangan era digital.

Secara individu, kontribusi masing-masing variabel terhadap Smart ASN dianalisis melalui nilai f-Square (f^2). Dari ketiga variabel bebas, Kompetensi Digital menunjukkan nilai f^2 tertinggi, yaitu sebesar 0,373, yang termasuk kategori sedang hingga besar. Hal ini menggambarkan bahwa penguasaan keterampilan digital sangat penting dalam proses transformasi ASN menuju profil yang cerdas dan modern. ASN yang kompeten secara digital mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil ini memperkuat pentingnya program pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran berkelanjutan yang fokus pada penguasaan digital tools dalam konteks birokrasi.

Sementara itu, variabel Digital Mindset memiliki nilai f^2 sebesar 0,144, yang meskipun tergolong kecil hingga sedang, tetap memberikan kontribusi yang berarti. Digital Mindset mencerminkan kesiapan mental, keterbukaan terhadap inovasi, dan semangat untuk terus berkembang di era transformasi digital. ASN yang memiliki pola pikir digital lebih mudah menerima perubahan, bersedia beradaptasi, dan cenderung berani mencoba pendekatan kerja yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam birokrasi tidak hanya bergantung pada alat atau sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusianya untuk berubah dan berkembang.

Variabel terakhir, Pemahaman terhadap Good Governance, mencatat nilai f^2 sebesar 0,115. Nilai ini juga berada pada kategori kecil hingga sedang, namun tetap signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa transformasi ASN menuju birokrasi digital tetap membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. ASN yang memahami dan menerapkan prinsip Good Governance dalam tugas-tugasnya akan mampu memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab, serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik meskipun sistem kerja telah berubah secara digital.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Kompetensi digital menyediakan keterampilan teknis, Digital Mindset memperkuat kesiapan mental dan sikap adaptif, sedangkan Good Governance menjadi fondasi nilai dan etika dalam penggunaan teknologi. Kombinasi ketiganya menjadi kunci penting dalam mewujudkan ASN yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan holistik dalam

pengembangan sumber daya manusia ASN, dengan fokus pada keterampilan, pola pikir, dan nilai-nilai etika sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam era birokrasi digital.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter Smart ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dipengaruhi secara signifikan oleh tiga variabel utama, yaitu digital mindset, kompetensi digital, dan pemahaman terhadap prinsip good governance. Kompetensi digital memiliki pengaruh terbesar terhadap Smart ASN dengan koefisien jalur sebesar 0,489 dan nilai signifikansi yang tinggi ($t = 5,607$, $p < 0,05$), yang menandakan bahwa kemampuan ASN dalam mengoperasikan teknologi dan memahami sistem digital menjadi faktor kunci dalam menghadapi tuntutan digitalisasi birokrasi. Selanjutnya, digital mindset juga memberikan kontribusi positif (koefisien 0,291, $t = 3,304$, $p < 0,05$), yang mengindikasikan pentingnya pola pikir terbuka dan adaptif terhadap inovasi teknologi untuk menciptakan ASN yang cerdas dan responsif. Selain itu, pemahaman good governance turut berperan signifikan (koefisien 0,205, $t = 3,378$, $p < 0,05$) dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas di era digital. Secara simultan, ketiga variabel ini mampu menjelaskan 79,7% variasi dalam pembentukan Smart ASN, menegaskan bahwa penguatan kapabilitas digital dan internalisasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang adaptif dan berintegritas dalam birokrasi modern. Oleh karena itu, disarankan bagi Dinas Kominfo Kabupaten Badung untuk terus mengupayakan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital, sekaligus membumikan prinsip good governance agar tercipta ASN yang tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga tangguh secara etika dan responsif terhadap perkembangan zaman.

REFERENSI

- Abdillah, F., Suhadi, S., Tertia, C. P., Tarigan, A. R., Andri, A., & Fahrezi, F. (2021). Pemberdayaan Taman Baca Masyarakat dan Guru Sekolah Dasar dalam Menyiasati Pandemi Siber: Gotong Royong melalui Digital Civic Engagement. *Publ. Pendidik.*, 11(2), 158.
<https://doi.org/10.26858/publikan.v11i2.16438>
- Cao, J., Bhuvanewari, G., Arumugam, T., & Aravind, B. R. (2023). The Digital Edge: Examining The Relationship Between Digital Competency And Language Learning Outcomes. *Frontiers In Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/Fpsyg.2023.1187909>
- Chapco-Wade-Safina, C. (2018). *Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: What's The Difference?* <https://colleenchapcowadesafina.Medium.Com/>.
<https://colleenchapcowadesafina.medium.com/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf>
- Damayanti, D. A. S., Suyadnya, I. M. A., & Khrisne, D. C. (2021). Helpdesk Ticketing Information System Based On Android At Communication And Information Department Of Badung Regency. *Journal Of Electrical Electronics And Informatics*, 5(2).
<https://doi.org/10.24843/Jeei.2021.V05.I02.P01>
- Dewi, S. (2020). *Keamanan Jaringan Menggunakan Vpn (Virtual Private Network) Dengan Metode Pptp (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraharja Ciamis. Evolusi - Jurnal Sains Dan Manajemen*. 8. <https://doi.org/10.31294/Evolusi.V8i1.7658>
- Ghozali, I. (2018). *Structural Equation Modelling*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares "Konsep, Teknik dan aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0"* (1st ed.). YOGA PRATAMA, Semarang.
- Gusman, S. W. (2024). Development Of The Indonesian Government's Digital Transformation. *Dinasti International Journal Of Education Management And Social Science*, 5(5).
<https://doi.org/10.38035/Dijemss.V5i5.2868>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

456

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



- Hair, J. F., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Cengage.
<https://books.google.co.id/books?id=0R9ZswEACAAJ>
- Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan Amos, Lisrel dan PLS*. Jakarta: Luxima.
- Kifaru, F., Kavuta, K., & Semlambo, A. (2023). Assessment Of The Impacts Of Cyber Security On Student Information Management Systems. *The Journal Of Informatics*, 3(1).
<https://doi.org/10.59645/Tji.V3i1.127>
- Kurniawan, D., & Mumpuni Arti, R. (2020). Comparative study of a cybersecurity curriculum to support digital transformation in the public sector. *Proceedings*, 547.
<https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.427>
- Lachova, K. (2021). Digital Transformation as a Strategy of Value Creation in Industry. *Acta Mechanica Slovaca*, 25(3), 52–56. <https://doi.org/10.21496/ams.2021.027>
- Mindarti, L. I., Widodo, N., & Mahendra, M. P. S. (2020). INTEGRATED LICENSING INFORMATION SYSTEM (SIJITU) APPLICATION IN LICENSING SERVICE (A study at Department of Capital Investment and One-Stop Integrated Services in Ponorogo District). *Dia*, 18(1), 99–111. <https://doi.org/10.30996/dia.v18i1.3348>
- Mutambik, I., Lee, J., Almuqrin, A., & Zhang, J. Z. (2023). Transitioning to Smart Cities in Gulf Cooperation Council Countries: The Role of Leadership and Organisational Culture. *Sustainability*, 15(13), 10490. <https://doi.org/10.3390/su151310490>
- Öngel, V., Günsel, A., Gençer Çelik, G., Altındağ, E., & Tatlı, H. S. (2023). Digital Leadership's Influence on Individual Creativity and Employee Performance: A View through the Generational Lens. *Behavioral Sciences*, 14(1), 3. <https://doi.org/10.3390/bs14010003>
- Partono, P., Wardhani, H. N., Setyowati, N. I., Tsalitsa, A., & Putri, S. N. (2021). Strategi Meningkatkan Kompetensi 4C (Critical Thinking, Creativity, Communication, & Collaborative). *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 14(1), 41–52. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v14i1.35810>
- Rauan, V., Wawointana, T., Sendouw, R. H. E., & Tarore, S. (2022). Digitization of Health Services at Kakaskasen Health Center, North Tomohon District, Tomohon City. *SHS Web of Conferences*, 149, 01015. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901015>
- Rupeika-Apoga, R., Bule, L., & Petrovska, K. (2022). Digital Transformation of Small and Medium Enterprises: Aspects of Public Support. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.3390/jrfm15020045>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2023). *An Updated Assessment of Model Evaluation Practices in PLS-SEM: An Abstract* (B. Jochims & J. Allen (eds.)). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24687-6_31
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347. <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- Sudibjo, N., Aulia, S., & Harsanti, H. R. (2022). Empowering Personal Knowledge Management Among Teachers in Indonesia: A Multi-Faceted Approach using SEM. *Sage Open*, 12(1).
<https://doi.org/10.1177/21582440221085001>
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian* (30th ed.). Alfabeta, Bandung.
- Tridalestari, F. A., & Prasetyo, H. N. (2024). Impact of data cultural aspect to data governance program in higher education. *Journal of Governance and Regulation*, 13(3), 8–16.
<https://doi.org/10.22495/jgrv13i3art1>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2020). *Pengantar Statistika (Edisi Ketiga): Cara Mudah Memahami Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vartolomei, C., & Avasilcăi, S. (2020). Security and privacy implementation framework as a result of the digitalization process for organizations in different industries. In *Innovation in Sustainable*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

Management and Entrepreneurship (pp. 41–51). Springer International Publishing.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-44711-3_4

Vaska, S., Massaro, M., Bagarotto, E. M., & Dal Mas, F. (2021). The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review. *Frontiers in Psychology*, 11.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.539363>

Wuersch, L., Neher, A., Maley, J. F., & Peter, M. K. (2024). Using a Digital Internal Communication Strategy for Digital Capability Development. *International Journal of Strategic Communication*, 18(3), 167–188. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2024.2330405>

Zahra, N. (2023). Meningkatkan Inklusi dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran hingga Pemberdayaan. <https://doi.org/10.35497/565200>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

458

